



**STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI  
PEKERJAAN DAN DISTRIBUSI MENURUT AS-SYAIBANI  
DAN RELEFANSINYA DI INDONESIA**

**Syamsuri, Ainun Amalia Zuhroh**

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia

Email: syamsuri@unida.gontor.ac.id, ainunamalia97@gmail.com

**Abstract:** In this study will make one of the economic problems that become the focus of the study, namely poverty reduction. Poverty has always been associated with employment issues and has an impact on fair distribution policies in a country. The lack of jobs for decent communities and the right of people to gain access to affordable living needs are additional indicators of the causes of poverty. Therefore, there needs to be research that discusses poverty alleviation strategies. So there is a need for research that discusses poverty alleviation strategies, especially making the concept of Muslim figures as one of the references that can be implemented. With qualitative research method where the data collected in the form of a collection of articles and papers relevant to the formulation of problems and research variables. Literature studies in this study to analyze the problem of poverty alleviation through literature studies in the book *Al-Kasb* by Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad As-Syaibani. This article aims to answer the problem of poverty and its alleviation strategy in Indonesia and As-Syaibani the concept of work and distribution according to As-Syaibani as an instrument of poverty alleviation strategy in Indonesia. The results of this study show that work and distribution policy is the main aspect that directly affects the implementation of poverty alleviation. Where As-Syaibani emphasizes poverty alleviation through the concept of microeconomics as a provider of jobs as a solution to cause poverty in the aspect of unemployment of the Indonesian population. Then As-Syaibani's

thoughts on distribution, he emphasized the element of cooperation and with the principle of mutual need between one another in carrying out a job. There is a great meaning that whatever position a worker occupies he has a function according to his position. Just like in the case of a poor man in need of a rich man, while the rich need the energy of the poor.

**Keywords:** poverty, employment, distribution, economy, social welfare.

**Abstrak:** Pada penelitian ini akan menjadikan salah satu masalah ekonomi yang menjadi fokus kajian yaitu penanggulangan kemiskinan. Latar Belakang: Kemiskinan selalu dikaitkan dengan masalah ketenagakerjaan dan berdampak pada kebijakan distribusi yang adil di suatu negara. Tidak adanya lapangan kerja bagi masyarakat yang layak dan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup yang terjangkau menjadi indikator tambahan penyebab kemiskinan. Keunikan: Maka perlu adanya penelitian yang membahas mengenai strategi pengentasan kemiskinan khususnya menjadikan konsep tokoh muslim sebagai salah satu rujukan yang dapat diimplementasikan. Metode Penelitian: Dengan metode penelitian kualitatif dimana data yang dikumpulkan berupa kumpulan artikel dan karya tulis yang relevan dengan rumusan masalah dan variabel penelitian. Kajian kepustakaan dalam penelitian ini guna menganalisis permasalahan pengentasan kemiskinan melalui studi kepustakaan pada buku Al-Kasb karya Abu Abdillah Muhammad bin al-Hasan bin Farqad As-Syaibani. Artikel ini bertujuan untuk menjawab problematika kemiskinan dan strategi pengentasannya di Indonesia serta As-Syaibani konsep pekerjaan dan distribusi menurut As-Syaibani sebagai instrument strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian: Menunjukkan bahwa pekerjaan dan kebijakan distribusi merupakan aspek utama yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Kesimpulan: Dimana As-Syaibani lebih menekankan pengentasan kemiskinan melalui konsep mikro ekonomi sebagai penyedia lapangan pekerjaan sebagai solusi penyebab kemiskinan pada aspek pengangguran penduduk Indonesia. Kemudian pemikiran As-Syaibani mengenai distribusi, beliau menekankan pada unsur kerja sama dan dengan prinsip saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam

melaksanakan suatu pekerjaan. Terdapat makna besar bahwa apapun posisi yang ditempati seorang pekerja ia mempunyai fungsi sesuai dengan posisinya tersebut. Seperti halnya dalam hal seorang yang fakir membutuhkan seorang yang kaya, sedang yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin.

**Kata kunci:** kemiskinan, pekerjaan, distribusi, ekonomi, kesejahteraan sosial.

## PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan merupakan salah satu permasalahan dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Dimana permasalahan kemiskinan merupakan bagian dalam pembangunan ekonomi yang bersifat multidimensi, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan aspek primer yang berupa miskin atas asset, organisasi sosial politik dan pengetahuan serta ketrempilan. Sedangkan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi (Ulya, 2018). Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis karena permasalahan tersebut sangat kompleks karena banyaknya faktor dan dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan tersebut. (Nano Prawiti, 2009).

Di banding pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat

sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen) (BPS, 2020). Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Yoghi Citra Pratma, 2014).

Upaya penanggulangan kemiskinan telah sejak lama dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dan bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pmdampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ulya, dari serangkaian upaya tersebut penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberkajutaannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri (Ulya, 2018). Namun, pada aspek penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja belumlah efektif dan mencapai tujuannya. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya angka pengangguran terbuka

pada beberapa daerah dimana pada tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,84% dibanding tahun 2019 (BPS, 2020). Adanya beberapa strategi penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan dan beberapa hambatan dalam pelaksanaannya maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam untuk melengkapi dan menguatkan beberapa penelitian terdahulu terkait penanggulangan kemiskinan di Indonesia terutama pada pengoptimalisasian distribusi dan pekerjaan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.

Maka sangat dibutuhkan beberapa penelitian mengenai cara penanggulangan kemiskinan. Sehingga dalam penelitian mengenai strategi pengentasan kemiskinan sangatlah membutuhkan analisis yang tepat, karena permasalahan pengentasan kemiskinan melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari beberapa variabel dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan (Prawoto, 2009). Disamping itu, Islam sebagai agama yang paling sempurna, senantiasa memberikan solusi yang manusiawi (*humanistic*) sesuai dengan permasalahan manusia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran, hadith maupun pendapat ulama muslim. Mengatur seluruh kehidupan manusia secara multidimensi baik dari aspek keduniawian maupun ukhrowi (Syamsuri, 2019).

Melihat beberapa permasalahan mengenai kemiskinan yaitu adanya permasalahan pelaksanaan pengentasan kemiskinan seperti pada aspek penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan

kerja yang belum efektif serta upaya penanggulangan kemiskinan yang semuanya berorientasi material, dimana keberkajutaannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah saja. Sehingga artikel ini akan mencoba menjawab permasalahan mengenai permasalahan dan melengkapi strategi pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan digambarkan konsep strategi pengentasan kemiskinan yang berlaku di Indonesia dan menghadirkan sebuah teori konseptual dari seorang tokoh muslim Abu Abdillah Muhammad bin Al-Hasan bin Farqad As-Syaibani sebagai alternatif yang dapat diimplikasikan dari telaah kitab fenomenalnya al kasb dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi umat, khususnya kemiskinan yaitu dengan tinjauan konsep pekerjaan dan distribusi.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Dalam peneitian yang dilakukan oleh Naerul Edwin, menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya, ditemukan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan, sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kemiskinan (Aprianto, 2017). Terkait dampak distribusi yang kurang adil dalam penelitian Yoghi, 2014 disebutkan bahwa distribusi pendapatan yang terjadi di 33 provinsi di Indonesia belum berjalan pada semestinya, dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi disparitas yang tinggi antara golongan yang terkaya dan termiskin, dan dsiparitas antara yang besar antara daerah terkaya dan termiskin, dan tingkat kemiskinan terjadi di daerah-daerah tertentu yang belum terjangkau

oleh pembangunan (Yoghi Citra Pratma, 2014). Telah banyak fenomena bahwa pada beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan angka kemiskinan dan belum maksimalnya perhatian pemerintah terkait hal tersebut. Pada penelitian menyebutkan bahwa analisis kemiskinan, strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kota Jambi memerlukan perhatian yang lebih serius dari semua pihak. Trend jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi cenderung meningkat. Kendati pun secara relative tidak terlihat adanya indikasi menurun dari persentase jumlah penduduk miskin. Kondisi ini diperkuat oleh meningkatnya besaran garis kemiskinan dan indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan (Ahmad Soleh, 2018).

Menurut data dari data Badan Pusat Statistik Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari pada tahun 2019 hingga tahun 2020 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Maret 2020 di daerah perkotaan naik sebanyak 1,3 juta orang (dari 9,86 juta orang pada September 2019 menjadi 11,16 juta orang pada Maret 2020). Sementara itu, daerah perdesaan naik sebanyak 333,9 ribu orang (dari 14,93 juta orang pada September 2019 menjadi 15,26 juta orang pada Maret 2020). Garis Kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp454.652,-/ kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp335.793,- (73,86 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp118.859,- (26,14 persen) (BPS, 2020). Kenaikan jumlah kemiskinan juga bersanding dengan peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi pada penduduk Indonesia secara umum. Data dar BPS menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 meningkat dibanding dengan tahun 2019 yang mana adapun jumlah angkatan

kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Dimana pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (BPS, 2020b).

Selain itu menurut Husna Ni'matul Ulya, 2018 yang menjadi penyebab kemiskinan jelaslah berbeda-beda, tergantung dengan jenis kemiskinan itu sendiri, begitu pula ada banyak indikator kemiskinan yang berbeda-beda. Sebagai contoh dari upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi dan sebagainya (Ulya, 2018). Terkait faktor kemiskinan yang beragam, dalam penelitian yang dilakukan Dhani, 2009 menyebutkan bahwa salah satu factor kemiskinan adalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Namun, terdapat sebuah solusi yang ia tawarkan pada penelitian tersebut bahwasannya pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi suatu upaya yang mutlak harus dilakukan. Mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar sehingga pemerintah daerah diharapkan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan (Dhani Kurniawan, 2009).

Namun menjadi sebuah kendala bahwa apabila program-program pengentasan kemiskinan belum berjalan dengan baik seperti pada penelitian yang dilakukan Nano, bahwa Program-program



pengentasan kemiskinan di Indonesia memberi lebih banyak penekanan pada aspek ekonomi daripada sosial, budaya, hukum dan bahkan religius. Ini kesalahan paradigmatik yang mengarah pada kesalahan analitis dan tidak menyertakan variabel-variabel yang signifikan bias menghasilkan perkiraan dan hasil yang tidak diharapkan (Prawoto, 2009). Permasalahan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutikno bahwa proses penentuan program sebagai evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dinilai masih belum dapat berjalan dengan baik. Dimana program tersebut seharusnya memenuhi tahapan memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin, kondisi infrastruktur dasar, persoalan sosial-budaya, dan potensi yang dimiliki, mengidentifikasi keinginan, harapan, dan memprediksi peluang pengembangan ekonomi (Sutikno , Eddy Setiadi Soedjono , Agnes Tuti Rumiati, 2010).

Disebutkan dalam sebuah penelitian bahwa terdapat solusi untuk dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan mengharuskan berkerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhannya karena kekurangan atau lemah dalam materi. Karena sesungguhnya orang miskin memiliki pekerjaan hanya saja belum dapat memenuhi kebutuhannya secara keseluruhan. Maka dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa distribusi yang adil merupakan solusi dalam menangani kemiskinan. Distribusi yang adil dapat dilakukan dengan bentuk infak, fidyah dan lain sebagainya (Moh. Agus Sifa', 2019). Kurangnya minat kerja sehingga dapat menjadi sebab problematika kemiskinan juga diungkapkan dalam penelitian Itang dimana adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib)

menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Sehingga disini diperlukan adanya kajian mengenai kontribusi yang membuktikan bahwa Islam memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan (Itang, 2015).

Salah satu bentuk kontribusi Islam terhadap pengentasan kemiskinan adalah dengan hadirnya konsep-konsep yang berkaitan dengan kemiskinan yaitu konsep pekerjaan dan distribusi. Salah satu tokoh ekonom muslim yang menjelaskan teori tersebut adalah As-Syaibani, dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahadil Amin, disebutkan bahwa Pandangan utama beliau diawali dari pendapatnya mengenai kewajiban untuk bekerja sebagai salah satu upaya dalam memperoleh nafkah atau kehidupan. Ini wajib dilakukan oleh segenap kaum muslim, karena seorang muslim tidak layak untuk berpangku tangan dan menunggu belas kasihan dari orang lain. Al-Syaibani menjelaskan bahwa bentuk produktivitas yang dilakukan seseorang merupakan bagian dari kewajiban yang disebut dengan *imaratul kaun* yakni menciptakan kemakmuran untuk semua makhluk. Sehingga bentuk produktivitas yang dimaksud tidak hanya bekerja untuk orang lain namun menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha (Al-Hasan, 2017). Oleh karena itu, dengan adanya problematika pengentasan kemiskinan di Indonesia dan dengan adanya kontribusi dari beberapa pemikiran tokoh ekonomi Islam mengenai hal-hal yang mempengaruhi kemiskinan, amat sangat memungkinkan untuk menjadikan konsep-konsep tokoh muslim seperti As-Syaibani sebagai rujukan dalam sistem pengentasan kemiskinan yang terjadi di Indonesia sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan yang kian terus meningkat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian studi kepustakaan. dalam penelitian kepustakaan kadang memiliki deskriptif dan juga memiliki ciri historis. Penelitian kepustakaan ini bisa meliputi kritik pemikiran, penelitian sejarah agama, dan dapat pula penelitian tentang karya tertentu atau naskah tertentu (Kaelan, 2010). Oleh karenanya penelitian kepustakaan ini akan mengumpulkan sumber data berupa buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan kemiskinan serta strategi pengentasannya terutama di Indonesia dengan dukungan data tingkat kemiskinan di Indonesia. Untuk itu dalam penelitian kepustakaan, mengumpulkan buku dan artikel-artikel harus secara bertahap dan dengan pengumpulan data secara menyeluruh. Data tersebut terkait dengan kemiskinan di Indonesia dan tingkat pengangguran sebagai indicator distribusi pekerjaan dimana memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia (Itang, 2015).

Dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, peneliti dapat lebih mengeksplorasi dan memahami permasalahan pengentasan kemiskinan. Serta dalam melakukan tinjauan pemikiran As-Syaibani mengenai problematika pengentasan kemiskinan yaitu dengan menelaah konsepnya dalam teori pekerjaan dan distribusi dalam bukunya *al-Kasb*. Maka dari itu penelitian ini selanjutnya akan mendeskripsikan strategi pengentasan kemiskinan kebijakan distribusi serta peluang lapangan pekerjaan di Indonesia kemudian menganalisisnya dengan teori-teori serta konsep pemikiran As-Syaibani sebagai solusi bagi permasalahan kemiskinan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan harus dipilih strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, sehingga terjadi perubahan struktural yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan, pemberdayaan sumber daya manusia .Dalam strategi pengentasan kemiskinan, kemiskinan dikelompokkan menjadi dua macam ukuran kemiskinan yang umum seperti halnya dimensi kemiskinan itu sendiri yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, konsep kemiskinan absolute ini menggunakan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Namun, pada konsep kemiskinan relatif menjelaskan bahwa orang yang memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya, maka orang tersebut masih termasuk ke dalam golongan miskin (Lincoln Arsyad, 2004).

Kemiskinan memiliki dimensi yang menyangkut masalah-masalah ekonomi dan non ekonomi. Karena memiliki sifat yang multidimensi, maka kemiskinan yang berdimensi ekonomi maka munculah pengelompokan kemiskinan yaitu kemiskinan absolut relative seperti yang disebutkan di atas (Sunartiningsih, 2004). Ada banyak usaha-usaha yang bisa dilakukan dalam pengentasan kemiskinan, pemerintah telah melakukan banyak program dan wacana dalam pengentasan kemiskinan, khususnya di negara Indonesia. Selama ini, berbagai upaya yang dalam menanggulangi kemiskinan, antara lain merumuskan berbagai standar obyektif garis kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan (Atma Ras, 2013). Seperti yang diungkapkan oleh Atma, bahwa seluruh program pengentasan

kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat (M. Nur Rianto, 2012).

### **Pekerjaan dan Kemiskinan di Indonesia dan konsep Pekerjaan menurut As-Syaibani**

Belum terlaksananya program pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tingkat penyediaan lapangan pekerjaan yang mencukupi sehingga masih terdapat tingkat pengangguran penduduk yang masih relatif tinggi. Dikarenakan kenaikan jumlah kemiskinan juga bersanding dengan peningkatan dapat dilihat bahwa jumlah pengangguran yang terjadi pada penduduk Indonesia secara umum. Data dari BPS menunjukkan bahwa kemiskinan secara keseluruhan yang naik dari angka 9,18 naik hingga 9,59 bagi jenis kelamin laki-laki dan 9,63 naik hingga 9,96 bagi perempuan selama periode tahun 2019 sampai tahun 2020 (BPS, 2020). Pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 meningkat dibanding dengan tahun 2019 yang mana adapun jumlah angkatan kerja pada Februari 2020 sebanyak 137,91 juta orang, naik 1,73 juta orang dibanding Februari 2019. Dimana pada tingkat pengangguran terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 7,07 persen, meningkat 1,84 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2019 (BPS, 2020b).

Sehingga dalam menyikapi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dengan adanya pekerjaan As-Syaibani menjelaskan Dalam kitab *al-Kasb*, As-Syaibani mendefinisikan *al-Kasb* (kerja) sebagai mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Dalam ilmu

ekonomi, aktivitas demikian termasuk dalam aktivitas produksi. As-Syaibani mendefinisikan *al kasb* (kerja) sebagai cara mencari perolehan harta melalui berbagai cara yang halal. Sedangkan produksi suatu barang dalam ilmu ekonomi dilakukan karena ia mempunyai utilitas (nilai guna). Dalam ekonomi islam nilai guna tersebut diukur dari kemaslahatannya (Abulhasan M. Sadeq, 1992). As-Syaibani juga menyatakan bahwa bekerja merupakan ajaran para rasul terdahulu dan kaum muslimin diperintahkan untuk meneladani cara hidup mereka. Dari uraian tersebut, tampak jelas bahwa orientasi bekerja dalam pandangan As-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses produksi, konsumsi dan distribusi yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. As-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu sewa menyewa (*ijarah*), perdagangan (*tijarah*), pertanian (*zaira'ah*) dan perindustrian (*sina'ah*). (Muhammad bin Hasan Al Hasan Al Syaibani, 1986)

Ketidak mampuan dan kegagalan dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia meliputi beberapa hal. Program penanggulangan kemiskinan yang mengalami kendala sehingga menyebabkan kegagalan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pertama, program penanggulangan kemiskinan selama ini terfokus pada program bantuan sosial untuk orang miskin. Di sisi lain program bantuan yang berorientasikan kepada kedermawanan pemerintah berpotensi untuk memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program kedermawanan pemerintah ini dapat

menjadikan beberapa masyarakat miskin selalu bergantung baik budi pemerintah tanpa adanya kerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga program kemiskinan tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara local.(Setiadi, 2011)

Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan yang belum terlaksana dengan baik karena terbatas pada bantuan sosial saja dapat di kembangkan dengan teori atau konsep yang dikemukakan oleh As-Syaibani yaitu dengan mengadakan program Penciptaan lapangan kerja atau wirausaha merupakan suatu kegiatan ekonomi yang di dalamnya memungkinkan melibatkan orang yang banyak, mulai dari tahap awal sampai menghasilkan suatu produk dan jasa. Sehingga tidak heran kewirausahaan akan memberikan pengaruh positif pada perkembangan perekonomian bangsa. Inilah yang dimaksud al-Syaibani bahwa proses “kasb” merupakan bentuk dari ‘*imaratul kaun* yang dapat menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk yang bekerja atau menciptakan pekerjaan di suatu negara, maka dapat dipastikan negara tersebut akan makmur dan masyarakatnya pun sejahtera.(Muhammad bin Hasan Al-Hasan Al-Syaibani, 1986)

Terdapat juga beberapa pendapat mengenai strategi pengentasan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut antara lain pertama, pembangunan pertanian, yang ada pada suatu negara terletak pada kuatnya sektor basis, sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam pengentasan kemiskinan terutama di wilayah pedesaan. Kedua,

Pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses pelayanan sosial bagi rakyat miskin, baik dari segi pendidikan, kesehatan dan gizi. Ketiga, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat. Keempat, Bekerja. Kelima, Membantu Keluarga yang Lemah, Untuk memerangi kemiskinan. Keenam, Pengentasan Kemiskinan dengan Zakat (Lincoln Arsyad, 2004). Asy-Syaibani membagi usaha perekonomian menjadi empat macam, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan perindustrian. Dari keempat usaha perekonomian tersebut, Asy-Syabani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Dari segi hukum Asy-Syaibani membagi usaha-usaha perekonomian menjadi dua, yaitu *fardu kifayah* dan *fardu 'ain* (Muhammad bin Hasan Al Hasan Al Syaibani, 1986).

Al-Maududi juga menambahkan bahwa salah satu cara pengentasan kemiskinan adalah dengan cara hemat, Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintangkannya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya (pembelanjaan), hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena sikap berlebihan individu tersebut dalam menggunakan harta kekayaannya (Moh. Faizal, 2016). Maka sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan



keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga model instrumen yang diterapkan individu maupun negara dalam menentukan sumber-sumber ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya.

### **Distribusi Pekerjaan di Indonesia dengan Konsep Distribusi Menurut As-Syaibani Sebagai strategi Pengentasan Kemiskinan**

Konsep distribusi memiliki maksud yang lebih luas, yaitu peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja (Madnasir, 2010). Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakan ketiga faedah tersebut, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya, yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (channel of distribution) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (physical distribution) (Syed Nawab Haider Naqvi, 1994). Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat serta mendorong terciptanya keadilan distribusi. Namun, pemerintah selayaknya tidak berpihak dalam proses distribusi kepada suatu golongan atau orang tertentu. Di sisi lain, terciptanya keadilan dalam distribusi melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas harus terjamin oleh pemerintah (Aprianto, 2017).

Pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satu di antaranya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan tingkat pengangguran dapat dilihat kondisi suatu negara, apakah perekonomiannya berkembang atau lambat dan atau bahkan mengalami kemunduran. Selain itu dengan tingkat pengangguran, dapat dilihat pula ketimpangan atau kesenjangan distribusi pekerjaan yang diterima suatu masyarakat negara tersebut. Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya, Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja (Farid Al-Ghofari, 2010).

Hal tersebut dapat ditinjau dengan keadaan pengangguran di Indonesia sebagai indikator tingkat distribusi pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa adanya peningkatan tingkat pengangguran dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2020. Yaitu dapat dilihat dari prosentase tingkat pengangguran menurut jenjang pendidikannya yang mana dari data tersebut terbukti terdapat kenaikan angka pengangguran yang signifikan.

**Table 1.** Tingkat Pengangguran Terbuka

<b>Jenjang Pendidikan</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tidak Sekolah	1.65	1.08	0.92
Sekolah Dasar	4.61	3.23	3.25
Sekolah Menengah	11.29	8.86	9.18

Sekolah Tinggi	7.51	5.71	5.91
----------------	------	------	------

---

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Menurut tabel di atas, terjadi peningkatan pengangguran yang signifikan. Yaitu terjadi dari tahun 2019 hingga 2020 baik dari aspek tidak sekolah hingga sekolah tinggi. Kenaikan tersebut sangat terlihat pada jenjang Pendidikan sekolah menengah yaitu dari angka 8.86 naik menjadi 11.29 bagitupun pada tingkat sekolah tinggi yaitu dari angka 5.71 naik hingga 7.51. Padahal di Indonesia untuk menjalankan kebijakan distribusi di Indonesia telah ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, meneliti apakah mekanisme ekonomi sudah berjalan secara normal. Apabila terdapat penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-administratif, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (penimbunan), harus segera dihilangkan. Apabila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tetapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, maka dapat menempuh cara yang kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat (Aprianto, 2017).

Upaya di atas juga ditekankan oleh As-Syaibani yang menandakan bahwa seorang yang fakir membutuhkan orang kaya dan orang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Karena menurut Imam Asy-Syaibani bahwa manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan yang lain. Dari hasil tolong menolong itu, manusia jadi lebih mudah dalam menjalankan aktivitas kepadaNya. Kemudian ia menegaskan bahwa apabila seseorang bekerja dengan niat melaksanakan ketaatan kepadaNya atau membantu saudaranya untuk melaksanakan ibadah

kepadaNya, pekerjaan tersebut niscaya akan diberi ganjaran sesuai dengan niatnya. Dengan demikian, distribusi pekerjaan seperti yang di atas merupakan objek ekonomi yang mempunyai dua aspek secara bersamaan, yaitu aspek religius dan aspek ekonomis (Muhammad bin Hasan al-Hasan Al Syaibani, 1986). Sedangkan dalam distribusi pekerjaan yang dikemukakan oleh As-Syaibani terdapat pada penekanan unsur kerja sama dengan dasar prinsip saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Disini terdapat makna besar bahwa apapun posisi yang ditempati seorang pekerja ia mempunyai fungsi sesuai dengan posisinya tersebut. Dimana tanpa menjalankan hal tersebut maka hasil dari pekerjaan yang ada tidak akan tercapai secara maksimal. Ini sangat menunjukkan betapa sistem spesialisasi yang dicetuskan As-Syaibani sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tanpa memandang rendah dan tingginya jabatan dalam pekerjaan. Sehingga dapat di fahami bahwa suatu pekerjaan yang dilakukan setiap orang adalah berorientasi dalam rangka mencapai ridha Allah yang merupakan wujud dari ibadah kepadaNya.(Muhammad bin Hasan al -Hasan al-Syaibani, 1986)

Sehingga ketika kebijakan dalam menciptakan keadilan distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial yang adil di masyarakat. Kondisi sosial yang memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) dan kesejahteraan yang dapat dilihat dari menurunnya tingkat kemiskinan secara absolut, adanya kesempatan yang sama pada setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya aturan yang menjamin setiap orang mendapatkan haknya berdasarkan usaha-

usaha produktifnya. Untuk itu, diperlukan peran institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Peran kedua institusi tersebut (pemerintah dan masyarakat) sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan terapkan dengan baik ketika kedua institusi yang ada bekerja.

## **KESIMPULAN**

Upaya dalam pengentasan kemiskinan seperti pembangunan pertanian, pembangunan sumberdaya manusia, dan pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk membuat kebijakan pemerintah lebih efektif. Namun pengentasan kemiskinan di Indonesia belum terlaksana dengan maksimal. Seperti keterbatasan pengentasan kemiskinan yang hanya terdapat pada distribusi dana bagi masyarakat miskin dan meningkatnya jumlah pengangguran yang disebabkan oleh kurangnya distribusi pekerjaan yang merata sebagai indikator terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan penduduk Indonesia. Dalam mengatasi kemiskinan, maka seseorang harus rajin bekerja, peduli dengan sesama, kepedulian pemerintah terhadap kaum miskin, bagi yang mampu hendaknya memenuhi kewajiban-kewajiban seperti membayar zakat dan pemenuhan hak-hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhinya, serta bergaya hidup hemat. Tentunya di dalam pelaksanaannya diharapkan semua pihak dianjurkan untuk meningkatkan kesadarannya, sebagai khalifah yang diberikan tanggung jawab.

Mengenai permasalahan pengentasan kemiskinan, dapat menjadikan pemikiran As-Syaibani dalam karyanya *Al-Kasb* sebagai alternatif dan solusi dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan. Pemikiran beliau tentang ekonomi terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

al-Kasb (kerja), kekayaan dan kefakiran klasifikasi usaha-usaha perekonomian, kebutuhan-kebutuhan ekonomi, spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Dimana As-Syaibani lebih menekankan kepada pelaksanaan ekonomi mikro sebagai solusi dalam pengadaan lapangan pekerjaan. Sedangkan orientasi bekerja dalam pandangan Asy-Syaibani adalah hidup untuk meraih keridhaan Allah. Di sisi lain, kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses distribusi pekerjaan yang berimplikasi secara makro meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari usaha perekonomian yang dikemukakan, As-Syabani lebih mengutamakan usaha pertanian. Menurutnya pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

Perlu diketahui bahwa pemikiran As-Syaibani mengenai distribusi dalam karyanya Al-Kasb lebih menekankan pada unsur kerja sama dan dengan prinsip saling membutuhkan antara satu dan lainnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Terdapat makna besar bahwa apapun posisi yang ditempati seorang pekerja ia mempunyai fungsi sesuai dengan posisinya tersebut. Dimana As-Syaibani menandakan bahwa seorang yang fakir membutuhkan seorang yang kaya, sedang yang kaya membutuhkan tenaga orang miskin. Dari hasil tolong-menolong tersebut, manusia akan semakin mudah dalam menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah.

## REFERENSI

- Ahmad Soleh. (2018). Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Jambi. *EKSIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1).
- Al-Hasan, F. A. (2017). Pemikiran As-Syabani dan Relevansinya dengan Peningkatan Entrepreneur Muda Muslim di Indonesia. *Kajian Timur Tengah dan Islam-Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam*.  
<https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.693>
- Atma Ras. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Socius*, 14(1), 58.
- BPS. (2020a). *Persentase Penduduk Yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Nasional*.
- BPS. (2020b). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*.
- BPS, T. (2019). *No Title*. Bps. BPS 2019 [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/).
- Dhani Kurniawan. (2009). Kemiskinan di Indonesia dan Solusinya. *Gema Eksos E-Jurnal Unisfat*, 1(1), 16.
- Farid Al-Ghofari. (2010). *Analisis Tingkat Pengangguran di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Itang. (2015). Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkia Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 16(1).
- Kaelan. (2010). *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Paradigma.
- Lincoln Arsyad. (2004). *Ekonomi Pembangunan* (4th ed.). Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- M. Nur Rianto. (2012). Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Indo Islamika*, 2(1), 19.

- Madnasir. (2010). *Distribusi dalam Islam*. ASAS.
- Moh. Agus Sifa'. (2019). Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Serta Solusinya Dalam Perspektif Islam. *Journal of Sharia Economics*, 1(1).
- Moh. Faizal. (2016). Studi Pemikiran Abu A'la al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 89.
- Muhammad bin Hasan al-Hasan al-Syaibani. (1986). *al Iktisab fi al Rizq al Mustahab* (2nd ed.). Dar al Kutub al Ilmiyyah.
- Nano Prawiti. (2009). Memahami Kemiskinan dan Stratego Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1), 58.
- Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 9(1).
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 3(1).
- Setiadi, et. a. (2011). *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Prenada Media Grup.
- Sunartiningsih. (2004). *Memberdayakan Masyarakat Desa Melalui Institusi Lokal* (A. Media (ed.)).
- Sutikno , Eddy Setiadi Soedjono , Agnes Tuti Rumiati, dan L. T. (2010). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1), 135.
- Syamsuri, S. (2019). Pendekatan Islam dalam Pembangunan Ekonomi: Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*.  
<https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i1.1624>



Syamsuri, Ainun Amalia Zuhroh

Syed Nawab Haider Naqvi. (1994). *Islam, Economics and Society*. Kegan Paul International Ltd.

Ulya, H. N. (2018). Paradigma Kemiskinan dalam Perspektif Islam dan Konvensional. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1448>

Yoghi Citra Pratma. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Management*, 4(2).